

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PENGATURAN USAHA TEMPAT HIBURAN
KARAOKE DENGAN MEMPERTIMBANGKAN NILAI-NILAI
YANG HIDUP DI MASYARAKAT DAN IMPLIKASI DALAM
PENEGAKAN HUKUMNYA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian
Persyaratan Mencapai Derajat Magister (Strata Dua)

Program Magister Ilmu Hukum



Oleh

**ADI SUSATYO
2010-02-002**

**PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS MURIA
KUDUS
2013**



**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PENGATURAN USAHA TEMPAT HIBURAN
KARAOKE DENGAN MEMPERTIMBANGKAN NILAI-NILAI
YANG HIDUP DI MASYARAKAT DAN IMPLIKASI DALAM
PENEGAKAN HUKUMNYA**

Disusun Oleh :

**Adi Susatyo
2010-02-002**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hidayatullah, SH.M.Hum

Subarkah, SH.M.Hum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA
KUDUS
2013**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini dengan judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGATURAN USAHA TEMPAT HIBURAN KARAOKE DENGAN MEMPERTIMBANGKAN NILAI-NILAI YANG HIDUP DI MASYARAKAT DAN IMPLIKASI DALAM PENEGAKAN HUKUMNYA ”**.

Tesis ini disusun guna melengkapi sebagian dari tugas yang sekaligus merupakan persyaratan dalam mencapai derajat magister pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang secara khusus ditujukan kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktunya membimbing dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan tesis ini.
2. Bapak Subarkah, SH.M.Hum, Pembimbing Pendamping yang telah berkenan pula meluangkan waktunya membimbing dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.

3. Seluruh guru besar dan dosen serta staf pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Bapak, ibu, istriku dan anakku tercinta yang telah banyak mengorbankan waktu, memberikan do'a dan kasih sayang serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis.
5. Pejabat dan staf Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait langsung maupun tidak langsung dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam penelitian ini.
6. Kakak, adik dan saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat dan do'a serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amien...

Kudus, Oktober 2013

P e n u l i s

Adi Susatyo

ABSTRACT

THE POLICY OF KUDUS LOCAL GOVERNMENT CONCERNING TO REGULATES KARAOKE ENTERTAINMENT WITH VALUES ARE LIVE IN SOCIETY CONSIDERATION AND IMPLICATION OF ITS LAW ENFORCEMENT.

This research titled “The Policy of Kudus Local Government concerning to Regulates Karaoke Entertainment With Values are live in Society Consideration and Implication of Its Law Enforcement”, commonly has a point to know the implication law enforcement by state institution instrument who have power to broke the Regent Regulation.

As we know that Kudus Local Government had make regulation in order to regulates certainty of karaoke entertainment. This policy made by consideration of values live in society. This regent regulation appropriate with the state regulation order that doesn't have penal power. So in hope next will make regulation which have power to force of penal power in state regulation.

The practical useful of this research is give or an idea according the policy to build karaoke entertainment in Kudus regency, after get the data then order sistimatically ang analize qualitatively in order to get abaout the problem clearly and then order the scientific thesis.

The methode of data analysis use by the writer is primary data analized by qualitatively that have data reduction step, present data, verification or get conclusion. The conclution got by this research is “The Policy of Kudus Local Government concerning to Regulates Karaoke Entertainment With Values are Live in Society Consideration and Implication of its Law Enforcement as such as :

- 1) Regulates the karaoke entertainment bussines in regent regulation not in state regulation.
- 2) While this implication of law enforcement about karaoke entertainment in regent regulation can't give the punishment penal power for the enterpreuner who broke the law.
- 3) Basicly Kudus Local Government to regulates karaoke entertainment business is appropriate with the values are live in society.

(Keyword : Public Policy, Values are live and Law Enforcement)

INTISARI

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus Tentang Pengaturan Usaha Tempat Hiburan Karaoke Dengan Mempertimbangkan Nilai-Nilai Yang Hidup Di Masyarakat Dan Implikasi Dalam Penegakan Hukumnya

Penelitian ini berjudul Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus Tentang Pengaturan Usaha Tempat Hiburan Karaoke Dengan Mempertimbangkan Nilai-Nilai Yang Hidup Di Masyarakat dan Implikasi Dalam Penegakan Hukumnya, secara umum mempunyai tujuan untuk mengetahui pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatur usaha tempat hiburan karaoke dalam bentuk peraturan bupati, serta mengetahui implikasi penegakkan hukum oleh aparat satuan kerja perangkat daerah/ instansi yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan Bupati tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengeluarkan Peraturan Bupati dalam upaya mengatur ketentuan mengenai tempat hiburan karaoke. Kebijakan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peraturan Bupati ini sesuai dengan tata urutan perundangan di daerah tidak memiliki kekuatan pidana. Oleh karena itu diharapkan ke depan perlu diterbitkan peraturan yang memiliki kekuatan memaksa atau pidana yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini pada dasarnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan kebijakan pendirian tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kudus. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai tesis yang bersifat ilmiah.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah data primer dianalisis secara kualitatif (*juridis empiris*) yang meliputi tahap pengumpulan data, penyajian data, verifikasi atau penarikan simpulan. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengaturan hiburan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan dasar dalam penegakan hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaturan usaha tempat hiburan karaoke sementara ini dilakukan dalam bentuk peraturan bupati, bukan peraturan daerah.
- 2) Sementara ini implikasi penegakan hukum tentang hiburan karaoke dalam bentuk peraturan bupati belum bisa memberikan hukuman yang bersifat pidana bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran.
- 3) Pada dasarnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatur usaha tempat karaoke telah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

(Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Nilai-nilai Sosial, Penegakkan Hukum)

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Intisari	vi
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Sistematika Penulisan	28
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	29
B. Otonomi Daerah	33
C. Pengertian Hukum.....	37
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	55
B. Spesifikasi Penelitian	56
C. Jenis Data	57
D. Metode Pengumpulan Data	61
E. Metode Analisis Data	63
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Pengaturan tempat hiburan karaoke dalam bentuk Peraturan Bupati Sebagai Bentuk Freies Ermessen.....	65
B. Implikasi Penegakan Hukum Hiburan Karaoke Dalam Bentuk Peraturan Bupati.....	77
C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Mengatur Usaha Tempat Karaoke dan Nilai-Nilai Yang Berkembang di Masyarakat	86
 BAB IV P E N U T U P	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
 DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel : 4.1

Halaman
67



Halaman Persetujuan

TESIS

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PENGATURAN USAHA TEMPAT HIBURAN
KARAOKE DENGAN MEMPERTIMBANGKAN NILAI-NILAI
YANG HIDUP DI MASYARAKAT DAN IMPLIKASI DALAM
PENEGAKAN HUKUMNYA.**

Disusun Oleh

**Adi Susatyo
2010-02-002**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 18 Oktober 2013

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Dewan Penguji I

Dr. HIDAYATULLAH, SH, M.Hum

Dr. SUKRESNO, SH.M.Hum

Pembimbing Pendamping

Anggota Dewan Penguji II

SUBARKAH, SH, M.Hum

KRISTIYANTO, SH.MH

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal

Dr. Hidayatullah. SH. M.Hum
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : Adi Susatyo
NIM : 2010-02-002
Alamat : Desa Prambatan Lor RT 06/RW I Kec. Kaliwungu Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diplubikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan kelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Kudus, Oktober 2013

Yang membuat pernyataan

Adi Susatyo